

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara dengan kepulauan yang memiliki luas yang sangat besar, yang dimana memerlukan sistem Pemerintahan yang berintegrasi tinggi untuk mensejahterakan Pemerintahan Indonesia. Di Indonesia, Pemerintah daerah memiliki bentuk usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dimana tertuang dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintah daerah yang menyatakan bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah digunakan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat didalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana telah menghasilkan 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota.

Dengan penjelasan diatas, maka laporan keuangan harus benar-benar disusun secara baik dan benar. Oleh karena itu aparaturnya Pemerintah Daerah harus berusaha untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan sungguh-sungguh agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan suatu manfaat yang maksimal kepada para penggunanya. Hal tersebut menjelaskan bahwa usaha adalah hal yang sangat penting dalam suatu pencapaian. Terdapat sebuah ayat didalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah untuk berusaha, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah suatu perkataan yang benar”

Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang mukmin diperintahkan oleh Allah SWT untuk selalu berkata dan berbuat jujur dan senantiasa bertakwa kepada-Nya. Bertakwa dalam arti menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala yang diperintahkan. Sedangkan jujur dalam arti jujur dalam berkata maupun perbuatan dan tanpa menyembunyikan sesuatu. Dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan, sebelum Pemerintah daerah menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan, Pemerintah daerah dapat melihat laporan keuangan yang telah didukung oleh bukti dan diakui kebenarannya yang sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintah (SAP).

Laporan Keuangan pemerintah Daerah setiap tahunnya mendapatkan penilaian yang berupa opini dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Pujanira dan Taman (2017) menyatakan bahwa Badan Pengawasan Keuangan memiliki hasil audit berupa opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Laporan keuangan yang disusun Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul saat ini sudah terbilang cukup berkualitas dan bisa dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari opini audit yang diberikan BPK pada pemerintah daerah, tak sedikit juga pemerintah daerah Kabupaten Bantul mendapatkan

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut artinya pemerintah daerah sudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan memperoleh predikat WTP tahun 2018, BPK menemukan kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
 - a. Rencana pengadaan belum seluruhnya diinput
 - b. Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.84.970.492,94 atas pekerjaan pembangunan gedung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Dinas Kesehatan
 - c. Kekurangan volume atas pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Senilai Rp.271.350.166,46
2. Sistem Pengendalian Intern dalam penyusunan laporan keuangan
 - a. Kurang cermat dalam mengendalikan proses penyusunan anggaran di masing-masing OPD atau unit kerja.
 - b. Pengelolaan persediaan belum memadai
 - c. Penyelesaian Piutang yang Berpotensi tidak Tertagih belum Memadai
 - d. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bantul belum Tertib

- e. Tidak Terdapat Mekanisme Pelaporan dan Pengesahan atas Penerimaan Dana Bantuan Non APBD yang Langsung Diterima oleh OPD.

Selain itu, melalui surat hasil pemeriksaan BPK juga memberikan beberapa rekomendasi kepada Bupati Bantul agar dapat menindaklanjuti atas kelemahan tersebut selambat-lambatnya selama 60 hari. BPK berharap hasil pemeriksaan dapat mendorong dan memotivasi Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, maka dari itu peneliti perlu mengkaji lebih dalam mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Meskipun BPK telah memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul bukan berarti laporan keuangan yang dihasilkan tersebut bebas dari penyimpangan. Hal ini dilakukan terbatas karena beberapa penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah antara lain implementasi standar akuntansi pemerintahan, sistem informasi

manajemen daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi.

Fenomena umum yang sering terjadi pada laporan keuangan Pemerintah daerah yang telah mendapatkan opini audit dari BPK dengan hasil Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dikarenakan buruknya suatu kualitas laporan keuangan yang terjadi di Pemerintah Daerah tersebut, yang dimana pada umumnya disebabkan karena tidak diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan baik. Ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan meliputi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi: Masalah kewajiban, penyajian asset yang tidak memadai, penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak dan belanja.

Dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik juga harus diiringi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dalam berbagai cara sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas. Sehingga adanya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah suatu aplikasi yang terhubung didalam komputer yang dapat membantu pengelolaan keuangan disuatu pemerintah, baik itu pemerintah daerah/provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat kelurahan/kecamatan dengan sistem database berintegrasi, sehingga laporan keuangannya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk pengambilan keputusan.

Dalam suatu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam penerapan aplikasi misalnya mahalnnya harga komputer, kurang pahamnya pegawai tentang pemakaian komputer serta aplikasi, dan lain sebagainya. Pangestika dan Sari (2016) menyatakan bahwa SIMDA dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi manajemen daerah dalam menjalankan kegiatan didalam pemerintah, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang berkompentensi yang baik untuk membantu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta dapat menjalankan sistem pengendalian didalam pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia menurut Leiwakabessy (2016) merupakan suatu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi, tanggung jawab atau kewenangannya untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Kompetensi sumber daya manusia juga mencakup kapasitas yang harus dilihat dari latar belakang pendidikan, yang telah mengikuti pelatihan, dan memiliki pengalaman dibidang keuangan serta memiliki kemampuan untuk mencapai kinerja

yang dimana dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas.

Sumber daya manusia yang didasari dengan latar belakang pendidikan akuntansi, pengalaman, pelatihan dan lain sebagainya akan lebih mampu dalam memahami sistem yang berkaitan dengan akuntansi dengan baik. Kegagalan dalam memahami dapat disebabkan karena tidak diterapkannya sistem akuntansi yang nantinya akan berdampak pada kesalahan pengelolaan laporan keuangan yang menyebabkan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan (Abidin dkk, 2018). Permasalahan dalam kompetensi sumber daya manusia menjadi suatu tantangan disetiap pegawai khususnya bidang keuangan daerah. Permasalahan yang sering terjadi pada pegawai/staf pengelolaan keuangan yaitu dalam penyusunan laporan keuangan yang dimana dalam pengelolaan keuangan pegawai/staf tersebut yang kurang memiliki skill, pengetahuan dan kemampuan dalam bidang akuntansi.

Pemerintah daerah juga harus dapat memperhatikan atau menciptakan suatu laporan keuangan yang berkualitas yaitu dengan adanya komitmen organisasi. Komitmen dapat menunjukkan suatu keyakinan atau dukungan yang kuat terhadap tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Dalam hal ini, komitmen organisasi tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran dan lain-lain. Tetapi komitmen organisasi tumbuh karena adanya individu yang memiliki semangat yang tinggi untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Dengan

demikian, organisasi dapat memberikan dukungan moral serta individu dapat menerima nilai yang ada dan bertekad dari dalam diri untuk dapat mengabdikan kepada suatu organisasi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon dan Basid (2019). Perbedaan pada penelitian ini terdapat penambahan variabel implementasi standar akuntansi pemerintahan untuk melihat apakah variabel ini berdampak atau tidak terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta didukung oleh Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yang telah menjelaskan bahwa SAP berperan penting dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Selanjutnya menggantikan pemanfaatan teknologi informasi dengan sistem informasi manajemen daerah karena sistem informasi manajemen daerah merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah dengan didukung pemanfaatan teknologi informasi. Perbedaan kedua terdapat lokasi penelitian yang dimana penelitian sebelumnya dilakukan di Pemerintah Daerah di Wilayah DKI sedangkan penelitian ini survey pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul)”**.

Motivasi dari penelitian ini yaitu sesuai dengan fenomena yang terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Bantul yang dimana adanya

ketidakpatuhan pegawai terhadap ketentuan perundang-undangan, kurang cermat dalam mengendalikan proses penyusunan anggaran masing-masing OPD atau unit kerja serta pengelolaan persediaan belum memadai. Motivasi peneliti berikutnya adalah karena adanya inkonsistensi hasil didalam penelitian sebelumnya, yang dimana peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian ulang terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga penting dilakukan karena mengingat adanya tuntutan dari pengguna laporan keuangan terhadap pemerintah daerah untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas.

B. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Terdapat beberapa hal yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah, dalam hal ini peneliti terbatas membahas mengenai Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu serta kemampuan peneliti.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah dalam menjelaskan penelitian ini adalah antara lain:

1. Apakah implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah sistem informasi manajemen daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendapatkan bukti survey pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mendapatkan bukti survey pengaruh sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mendapatkan bukti survey pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mendapatkan bukti survey pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

Didalam suatu penelitian pasti dapat memunculkan manfaat yang positif bagi semua pihak. Manfaat penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Setelah penelitian dilakukan diharapkan dapat memberikan kemajuan dan menjadi tambahan informasi bagi mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman tentang akuntansi sektor publik, yang dimana dapat membantu untuk mempermudah atau menjadikan penelitian ini sebagai acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang sehubungan dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pada Pemerintah daerah agar lebih maksimal dalam menyajikan laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta nantinya diharapkan dapat menambah wawasan baik dalam teori maupun praktik yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan dan dapat memberikan kontribusi positif dalam usaha penerapan standar akuntansi Pemerintahan, sistem informasi manajemen daerah, kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan terutama bagi daerah lokasi penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan mengenai apa yang harus dilakukan oleh

Instansi Pemerintah dalam hal ini Organisasi Pemerintah Daerah di
Kabupaten Bantul.